

TRANSPARANSI SISA HASIL USAHA BUMDes DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARI'AH SEBAGAI STRATEGI DESA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA (Studi Kasus pada BUMDes “Jaya Lestari” Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)

Sukma Uli Nuha¹, Endah Masrunik²

¹Universitas Islam Balitar, sukmauli7@gmail.com

²Universitas Islam Balitar, endahmasrunik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengungkap transparansi SHU BUMDes “Jaya Lestari” dalam perspektif akuntansi syari’ah. Didalam penelitian ini dipaparkan bahwa pemerintah didalam mensejahterakan masyarakat harus mempunyai strategi khusus untuk menggapai kesejahteraan tersebut. Selain itu didalam menyusun laporan harus transparan, sehingga pihak yang membutuhkan informasi memperoleh apa yang diinginkannya. Strategi pada BUMDes “Jaya Lestari” yaitu melalui kerja sama dengan PT Jatinom Indah Agri, dengan menginvestasikan dana yang dimilikinya dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut pandangan Akuntansi Syari’ah, strategi disini disebut Mudharabah yang artinya akad kerja sama antara dua belah pihak (penyedia modal dan pengelola modal). Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa melalui akad mudharabah akan membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan tersebut, tentunya juga akan membantu mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci : Transparansi, Sisa Hasil Usaha, dan BUMDes

Abstract

This research is a qualitative research with the purpose of revealing the transparency of SHU BUMDes "Jaya Lestari" in the perspective of shari'ah accounting. In this research explained that government in welfare society have to have special strategy to reach welfare. In addition, in preparing the report should be transparent, so that parties who need information to get what they want. Strategy on BUMDes "Jaya Lestari" is through cooperation with PT Jatinom Indah Agri, by investing the funds it has and obtaining the Business Result (SHU). According to Shari'ah accounting perspective, the strategy here is called Mudharabah which means cooperation contract between two parties (capital providers and capital managers). From the description above can be seen that through the mudharabah contract will help the government in increasing revenue. With the increase of income, of course also will help prosper society.

Keywords: Transparency, Remaining Business Results, and BUMDes

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokratis yang mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Aparat Negara atau pemerintahpun juga harus mampu menelurkan strategi – strategi didalam membangun daerah kepemimpinannya. Selain itu pemerintah juga harus transparan didalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memerhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan peranan tersebut, daerah diberikan kewenangan seluas – luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan otonomi daerah (Nurlan, 2007 : 15).

Pada penelitian ini, penulis memberi batasan tulisan yakni menguak transparansi SHU BUMDes “Jaya Lestari”, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dalam perspektif Akuntansi Syari’ah yang dijadikan strategi Desa dalam menambah kekayaan atau pendapatan Desa. Didalam memajukan dan membangun suatu perekonomian Desa, maka diperlukan partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan tersebut merupakan bentuk kegiatan dalam memajukan suatu bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya badan usaha yang mampu mengawal kekayaan Desa. Badan usaha tersebut disebut BUMDes atau (Badan Usaha Milik Desa).

Dalam mewujudkan suatu capaian (kesejahteraan masyarakat Desa) perlu adanya suatu strategi. Strategi yang dilakukan oleh BUMDes “Jaya Lestari” yaitu menjalin kerja sama yang akan mendapatkan keuntungan diantara kedua belah pihak. Disini BUMDes “Jaya Lestari” menjalin kerjasama bersama PT Jatinom Indah Agri didalam mengelola keuangannya. Menurut pandangan Akuntansi Syari’ah, akad kerja sama diantara dua belah pihak ini disebut akan mudharabah.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait transparansi SHU BUMDes dalam perspektif akuntansi syari’ah sebagai strategi Desa dalam menambah nilai kekayaan Desa tersebut. Fokus penelitian menggambarkan tentang bagaimana transparansi SHU yang dilakukan oleh BUMDes “Jaya Lestari” dalam perspektif akuntansi syari’ah guna menambah nilai kekayaan di Desa Jatinom. Di harapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai Transparansi Shu Bumdes Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Desa Dalam Khasanah Syari’ah dengan pendekatan Studi Kasus pada BUMDes “Jaya Lestari” Jatinom – Kecamatan Kanigoro – Kabupaten Blitar.

Didalam Permendagri Pasal 4 Ayat 7 No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Pemerintah dalam menyusun laporannya harus transparan dengan menyediakan informasi secara luas sehingga mudah diakses, diketahui, dan dievaluasi oleh pihak – pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas (Bastian, 2010 : 401).

Didalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, sangat diperlukan transparansi atau keterbukaan di berbagai hal. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatunya, sebagaimana dipaparkan didalam QS. Al Baqarah (2) Ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa BUMDes “Jaya Lestari” melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah didalam melayani masyarakat juga bersikap transparan, terkhusus terbuka pada SHU yang dijalankan itu.

Dilihat dari aspek ekonomi manajerial, Sitio dan Tamba (2001) menyatakan bahwa sisa hasil usaha (SHU) yaitu selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku. Artinya semakin besar transaksi usaha dan modal dari investor, maka akan semakin besar sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima. Keuntungan dari kerja sama ini sangatlah membantu BUMDes dalam mengelola keuangannya.

Menurut Permendes Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Herry, 2007 : 13). Karena BUMDes juga turut andil dalam mensejahterakan masyarakat desa, BUMDespun juga harus mempunyai strategi didalam mengelola keuangannya tersebut.

Menurut Jatmiko (2003 :4), Strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi.

Didalam meningkatkan pendapatan desa, strategi yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan melakukan kerja sama dengan kesepakatan bagi hasil pada waktu

yang telah disepakati bersama antara BUMDes “Jaya Lestari” dan PT Jatinom Indah Agri.

METODOLOGI

Pada sebuah penelitian ilmiah dibutuhkan sebuah metode, karena metode akan membantu peneliti dalam menentukan arah pada penelitiannya tersebut. metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi kualitatif. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit social tertentu yang bersifat apa adanya (Gunawan : 2016, 112). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada satu lokasi penelitian yaitu pada BUMDes Jatinom. Berdasarkan Peraturan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar No 02 Bab II Pasal 2 tahun 2011 tentang BUMDes pemerintah Desa membentuk dan mendirikan BUMDes yang bernama BUMDes “JAYA LESTARI” yang bertempat di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Didirikan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2011, pukul 15.45 WIB. (Akta Pendirian BUMDes “JAYA LESTARI” Jatinom).

Menurut peneliti, strategi yang digunakan oleh BUMDes “Jaya Lestari” sangatlah tepat didalam meningkatkan pendapatan Desa. Melalui strategi mudharabah akan menguntungkan kedua belah pihak, baik BUMDes “Jaya Lestari” maupun PT Jatinom Indah Agri. Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh dari kerja sama ini tentunya membantu pemerintah didalam mensejahterakan masyarakat.

Berikut perhitungan persentase pada BUMDes “Jaya Lestari” dan PT Jatinom Indah Agri sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)

NET PROFIT	Rp 100.559.93,-
MODAL INVESTOR	Rp 50.000.000,-
TOTAL KESELURUHAN MODAL INVESTOR	Rp 1.661.439.537,-

Sumber : Laporan SHU BUMdes “Jaya Lestari” dan PT Jatinom Indah Agri 2016 (Hasil wawancara : Juni, 2017)

Persentase Sisa Hasil Usaha (SHU)

$$\text{Rp } 50.000.000,- : \text{Rp } 1.661.439.537,- \times 100 = 3,01 \%$$

Sehingga sisa hasil usaha (SHU) yang dimiliki BUMDes Jaya Lestari yaitu sebagai berikut :

$$3,01 \% \times \text{Rp } 100.559.933,- = \text{Rp } 3.026.289,29,-$$

Dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa, BUMDes “Jaya Lestari” menerima penerimaan kas BUMDes dengan memperoleh SHU atau pendapatan bunga senilai Rp 3.026.389,29,-.

KESIMPULAN

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Jatinom, melalui BUMDes “Jaya Lestari” memang terlihat hasilnya dan tentunya mempunyai peranan didalam meningkatkan pendapatan Desa. Dari strategi tersebut, maka banyak pihak yang terlibat disini. Maka dari itu Pemerintah Jatinom, melaporkan secara transparans didalam melaporkan berbagai informasi kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Implementasi dari penelitian ini yaitu kita perlu adanya keberanian merubah kondisi keterpurukan dengan menciptakan strategi – strategi baru yang nantinya akan memberikan pengaruh dan dampak pada perubahan yang positif yang mana akan memberikan hasil yang memuaskan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa BUMDes “Jaya Lestari” memiliki tata laksana pemerintah yang baik (Good Governance) didalam menentukan keputusan atau strategi.

Selanjutnya bagi kalangan professional akuntan dan akademisi akuntansi, dari hasil penelitian ini dapat diambil pelajaran bahwa sangat diperlukan pengkajian strategi dalam meningkatkan pendapatan. Yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan focus penelitian, tidak hanya pada strategi saja akan tetapi lebih pada pertanggung jawaban pada apa yang diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akta Notaris Pendirian BUMDes “JAYA LESTARI” Jatinom pada Pasal 11 tentang Kekayaan Modal BUMDes “JAYA LESTARI”
- Andayani, Wurlan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Bayumedia : Malang
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi ketiga. Erlangga : Yogyakarta
- Bisri, Faisal. 2005. *Perencanaan Startegis*. Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks : Jakarta
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT Indeks : Jakarta
- Gunawan, Imam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Cetakan keempat. PT Bumi Aksara : Jakarta

- Iqsan. 2000. Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol.4, No.1, 2016. Halaman 230 – 240*
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Mitra Wacana Media : Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Erlangga : Jakarta
- Litbang Depkes RI dan International Labour Organization (ILO) tentang SDGs
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan ke tiga puluh tiga*. PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi Dua*. PT Salemba Emban Patria : Jakarta
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Cetakan kelima. PT Bumi Aksara : Jakarta
- Pantiyasa, I Wayan. 2011. *Metodologi Penelitian*. Andi : Yogyakarta
- Peraturan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar No 02 Bab II Pasal 2 tahun 2011 tentang BUMDes
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah
- Permendagri Pasal 4 Ayat 7 No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 13 Tahun 1994 Tentang Investasi
- Sharpe, William. 2005. *Investasi*. Edisi 6. Jilid 1. PT Indeks : Jakarta
- Sitio, Arifini dan Haloan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyonom. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta : Bandung
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Edisi 2. Cetakan kedua, PT Indeks : Jakarta
- Suwanda, Dadang dan Hendri. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (1) Tentang BUMDes
- Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat : Jakarta